



Evaluasi Operasional dan Efisiensi Anggaran SPPG Bengkol Berbasis Perbagi Nomor 9 Tahun 2025

Theofani Imanuel Sondakh Masengi ¹, Chelsea Liana Pandelaki ²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Manado

E-mail: imanueltheo26@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas operasional SPPG Bengkulu dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya pada pengelolaan persediaan bahan baku dan pengendalian biaya operasional berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan informan kunci yang terlibat dalam operasional SPPG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPG Bengkulu telah menerapkan beberapa praktik pengendalian, seperti pembatasan kas kecil harian, penggunaan nota sebagai bukti transaksi, verifikasi purchase order oleh akuntan, penyusunan menu dan anggaran mingguan, evaluasi pemasok melalui mekanisme retur atau potong nota, serta koordinasi dengan sekolah dan Badan Gizi Nasional. Namun, sebagian pengendalian masih bersifat informal dan belum terdokumentasi secara memadai. Penilaian risiko, evaluasi pemasok, pencatatan stok, laporan monitoring, dan tindak lanjut masih perlu diperkuat. SPPG Bengkulu dinilai cukup efektif, tetapi membutuhkan sistem pengendalian yang lebih sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Kata kunci — akuntabilitas publik; efisiensi anggaran; makan bergizi gratis; pengendalian internal; sppg

1. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendukung capaian pembelajaran, dan menggerakkan ekosistem ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan [1], [2], [3]. Dalam konteks tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi unit pelaksana yang menentukan keberhasilan program pada tingkat operasional.

Besarnya skala MBG menimbulkan konsekuensi terhadap kebutuhan tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel. Fenomena terbaru menunjukkan bahwa program ini menghadapi risiko tata kelola, mulai dari lemahnya pengawasan lintas aktor, potensi ketidakefisienan anggaran, hingga kebutuhan standarisasi operasional di tingkat dapur layanan [4], [5]. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari tersalurnya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan unit layanan menjaga mutu bahan baku, kepatuhan prosedur, ketepatan biaya, serta ketersediaan bukti pertanggungjawaban.

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 9 Tahun 2025 menekankan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai proses integral yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan. Lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, menjadi dasar untuk menilai apakah praktik operasional SPPG telah berjalan secara sistematis dan dapat dievaluasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas operasional dan efisiensi anggaran SPPG Bengkulu dengan menitikberatkan pada pengelolaan persediaan bahan baku dan pengendalian biaya operasional. Originalitas penelitian terletak pada penggunaan perspektif pengendalian internal sektor publik untuk menilai praktik harian SPPG pada level unit layanan. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi praktis bagi pengelola SPPG dalam memperkuat tata kelola serta kontribusi akademik bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik dan vokasi [6].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menelaah secara mendalam efektivitas operasional SPPG Bengkulu. Objek penelitian dipahami melalui konsep situasi sosial yang terdiri atas tempat, pelaku, dan aktivitas [7]. Tempat penelitian adalah dapur SPPG Bengkulu; pelaku yang menjadi informan utama meliputi kepala SPPG dan akuntan unit; sedangkan aktivitas yang dikaji mencakup pengelolaan anggaran, pengadaan bahan baku, koordinasi logistik, pencatatan transaksi, dan pengawasan operasional harian.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian membutuhkan informasi dari pihak yang memiliki kewenangan dan pengetahuan strategis terkait operasional SPPG. Pengumpulan informasi kemudian diperluas secara snowball sampling untuk memperoleh keterangan tambahan dari pihak terkait hingga informasi dinilai memadai [8].

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap alur kerja dapur. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan temuan lapangan terhadap lima unsur SPIP dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Analisis difokuskan pada kesesuaian praktik pengendalian, kelemahan yang masih muncul, dan kebutuhan penguatan dokumentasi agar pengelolaan persediaan serta biaya operasional dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Operasional SPPG Bengkulu

SPPG Bengkulu merupakan unit pelaksana MBG yang melayani sekitar 3.800 penerima manfaat. Skala layanan ini menuntut unit untuk memastikan ketersediaan bahan baku, penyusunan menu, penganggaran, pemesanan kepada mitra atau pemasok, produksi makanan, distribusi, serta pertanggungjawaban biaya secara rutin. Dalam perspektif manajemen operasional, pengendalian dibutuhkan untuk memastikan aktivitas berjalan sesuai tujuan, sumber daya digunakan secara efisien, dan penyimpangan dapat dicegah atau dikoreksi [9].

Temuan penelitian menunjukkan bahwa SPPG Bengkulu telah memiliki sejumlah praktik pengendalian harian, antara lain pembatasan kas kecil sebesar Rp500.000 per hari, penggunaan

nota untuk pengeluaran di luar kas kecil, verifikasi purchase order oleh akuntan, mekanisme retur atau pemotongan nota atas bahan baku yang tidak sesuai, serta keterlibatan ahli gizi dalam penyusunan menu mingguan. Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran pengendalian, meskipun belum seluruhnya dituangkan dalam dokumen formal.

Tabel 1. Alokasi biaya per porsi pada SPPG Bengkol

Jenis porsi	Bahan baku	Operasional	Sewa/fasilitas
Porsi kecil (Rp13.000)	Rp8.000	Rp3.000	Rp2.000
Porsi besar (Rp15.000)	Rp10.000	Rp3.000	Rp2.000

3.2 Analisis Berdasarkan Unsur SPIP

Berdasarkan lima unsur SPIP, efektivitas operasional SPPG Bengkol dapat dinilai cukup baik karena terdapat pembagian tugas, pengendalian biaya berdasarkan pagu, pemeriksaan bahan baku, komunikasi dengan sekolah dan pemasok, serta tindakan korektif atas bahan yang tidak sesuai. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena beberapa pengendalian masih bersifat informal, reaktif, dan sangat bergantung pada individu tertentu. Ringkasan temuan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan evaluasi pengendalian internal SPPG Bengkol

Unsur SPIP	Praktik yang ditemukan	Kebutuhan penguatan
Lingkungan pengendalian	Tugas akuntan, ahli gizi, asisten lapangan, dan kepala SPPG telah terbagi sesuai fungsi.	SOP tertulis, uraian jabatan, kode etik, dan prosedur pengganti pegawai perlu diformalkan.
Penilaian risiko	Risiko bahan baku, selisih pesanan, keterbatasan anggaran, penerimaan sekolah, dan distribusi telah dikenali.	Risk register, peta risiko, penilaian dampak-kemungkinan, dan penanggung jawab risiko perlu disusun.
Kegiatan pengendalian	Kas kecil dibatasi, PO diverifikasi, nota digunakan, retur/potong nota diterapkan, dan pemasok dapat diganti.	Buku kas kecil, kartu stok, laporan barang masuk-keluar, laporan retur, dan rekonsiliasi PO-nota perlu dibuat.
Informasi dan komunikasi	Koordinasi dilakukan antara ahli gizi, akuntan, sekolah, pemasok, dan BGN.	Logbook operasional, arsip digital, format laporan harian, dan catatan keluhan pemasok/sekolah perlu diperkuat.
Pemantauan	Kepala SPPG s iaga, akuntan memeriksa PO, ahli gizi memantau kebutuhan bahan, dan pemasok bermasalah dievaluasi.	Laporan monitoring berkala, evaluasi pemasok tertulis, laporan realisasi biaya, dan tindak lanjut temuan perlu didokumentasikan.

Pada unsur lingkungan pengendalian, pembagian fungsi menunjukkan adanya komitmen terhadap kompetensi. Ahli gizi menangani menu, akuntan mengelola anggaran dan administrasi, asisten lapangan mendata siswa, sedangkan kepala SPPG melakukan pengawasan umum. Pembagian ini mendukung prinsip bahwa fungsi teknis perlu dijalankan oleh pihak yang memiliki kemampuan memadai [10]. Meskipun demikian, mekanisme penggantian pegawai relawan yang masih informal dapat menimbulkan risiko apabila tidak disertai persetujuan, pencatatan, dan standar kompetensi. Pembagian tugas dan otorisasi yang jelas penting untuk mengurangi kesalahan serta penyalahgunaan kewenangan [11].

Pada unsur penilaian risiko, SPPG Bengkulu telah mengenali risiko utama berupa kualitas bahan baku, ketidaksesuaian barang dengan pesanan, keterbatasan alokasi biaya, penerimaan sekolah terhadap program, kehadiran relawan, dan distribusi kepada penerima manfaat. Contoh risiko kualitas tampak pada bahan baku yang tidak sesuai standar, seperti ikan tuna yang menimbulkan keluhan dan tempe yang rusak. Respons unit berupa retur, pemotongan nota, atau penggantian pemasok menunjukkan adanya mitigasi. Namun, penilaian risiko masih bersifat praktis dan reaktif, padahal manajemen risiko seharusnya dilakukan melalui identifikasi, analisis, evaluasi, dan respons yang sistematis [12].

Pada unsur kegiatan pengendalian, pembatasan kas kecil dan verifikasi PO menunjukkan adanya kontrol atas kas dan pengadaan. Penganggaran juga dilakukan dengan memperhatikan pagu per porsi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. Alur kerja ahli gizi-akuntan-pemasok memperlihatkan pemisahan fungsi sebelum transaksi dilakukan. Prinsip pemisahan fungsi penting agar satu pihak tidak menguasai seluruh tahapan transaksi dari otorisasi, pelaksanaan, pencatatan, hingga pengawasan [13]. Selain itu, keberadaan lima pemasok mengurangi ketergantungan pada satu pihak dan mendukung fleksibilitas ketika terjadi masalah kualitas atau keterlambatan pasokan [14].

Pada unsur informasi dan komunikasi, hubungan kerja antara ahli gizi, akuntan, sekolah, pemasok, dan BGN sudah berjalan untuk mendukung keputusan operasional. Data jumlah siswa menjadi dasar penentuan porsi, kebutuhan bahan baku, anggaran, dan distribusi. Komunikasi organisasi dibutuhkan agar pertukaran informasi mendukung koordinasi dan pencapaian tujuan [15]. Namun, perbedaan jam kerja antaraktor menimbulkan risiko hilangnya informasi apabila tidak tersedia logbook, arsip digital, dan laporan harian yang seragam. Sistem informasi yang baik harus menghasilkan data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat ditelusuri [16].

Pada unsur pemantauan, pengawasan harian dilakukan melalui keterlibatan kepala SPPG, pemeriksaan PO oleh akuntan, pemantauan kebutuhan bahan oleh ahli gizi, serta tindakan korektif terhadap pemasok bermasalah. Kendati demikian, pemantauan belum sepenuhnya memenuhi prinsip formal SPIP karena belum terlihat laporan monitoring berkala, evaluasi pemasok tertulis, laporan realisasi anggaran, maupun rencana tindak lanjut. Tanpa dokumentasi, unit akan sulit menunjukkan bahwa pengendalian berjalan konsisten dan dapat dievaluasi oleh pemangku kepentingan.

3.3 Penilaian Efektivitas Operasional dan Efisiensi Anggaran

Secara operasional, SPPG Bengkulu dapat dinilai cukup efektif karena mampu menjalankan layanan harian bagi sekitar 3.800 penerima manfaat, mengelola lima pemasok, menyusun menu mingguan, mengendalikan biaya berdasarkan pagu, membatasi kas kecil, dan menerapkan bukti transaksi. Pada pengelolaan persediaan bahan baku, unit telah melakukan pengecekan barang, pemantauan stok mingguan untuk beras dan minyak, serta retur atau penggantian pemasok apabila

ditemukan masalah kualitas. Praktik ini menunjukkan bahwa pengendalian telah berjalan pada tingkat operasional.

Namun, efektivitas tersebut perlu ditingkatkan agar lebih terdokumentasi, terukur, dan berkelanjutan. Kartu stok, berita acara penerimaan barang, laporan barang rusak, laporan retur, evaluasi pemasok, laporan realisasi biaya, dan rekonsiliasi kas kecil perlu disusun secara rutin. Penguatan ini penting karena kesalahan kecil dalam perhitungan bahan baku atau biaya dapat menyebabkan pemborosan, kekurangan porsi, penurunan kualitas layanan, dan lemahnya akuntabilitas anggaran publik.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPG Bengkol telah memiliki praktik pengendalian operasional dalam pengelolaan bahan baku dan biaya, seperti pembagian tugas, pembatasan kas kecil, penggunaan nota, verifikasi PO, penyusunan menu dan anggaran, mekanisme retur, serta komunikasi dengan sekolah dan pemasok. Dengan praktik tersebut, SPPG Bengkol dapat dinilai cukup efektif dalam menjalankan operasional harian. Namun, jika dibandingkan dengan unsur SPIP dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 9 Tahun 2025, masih terdapat kesenjangan pada aspek dokumentasi, penilaian risiko, pencatatan stok, evaluasi pemasok, laporan monitoring, dan tindak lanjut formal. Oleh karena itu, SPPG Bengkol perlu memperkuat SOP, risk register, kartu stok, laporan realisasi biaya, logbook operasional, arsip digital, dan laporan pemantauan berkala. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan instrumen evaluasi kuantitatif untuk mengukur hubungan antara kualitas pengendalian internal, efisiensi biaya, dan mutu layanan MBG pada beberapa SPPG yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Manado yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala SPPG Bengkol, Akuntan SPPG Bengkol, serta seluruh pihak yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan akses data selama proses penelitian berlangsung. Apresiasi turut diberikan kepada rekan-rekan peneliti yang telah berkontribusi dalam pengumpulan data, observasi lapangan, dan penyusunan artikel ilmiah ini sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Kiftiyah, F. A. Palestina, F. U. Abshar, and K. Rofiah, "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik," *Pancasila J. Keindonesiaan*, vol. 5, no. 1, pp. 101–112, Apr. 2025, doi: 10.52738/pjk.v5i1.726.
- [2] A. N. Ahsan and M. Alfaries, "PROGRAM PEMERINTAH PEMBERIAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) UNTUK MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL MENUJU INDONESIA EMAS 2045 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL," *J. ELEKTROSISTA*, vol. 13, no. 1, pp. 28–39, Dec. 2025, doi: 10.63824/jtep.v13i1.399.
- [3] Albaburrahim, A. P. A. Putikadyanto, A. N. Efendi, M. A. Alatas, S. Romadhon, and L. R. Wachidah, "Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045," *J. Pendidik. Ilmu Pengetah. Sos. dan Ilmu-Ilmu Sos.*, 2025, doi: <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19191>.

- [4] I. Balindra, “KPK Kritik Program MBG: Regulasi Lemah, Pengawasan Minim,” TEMPO. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/hukum/kpk-kritik-program-mbg-regulasi-lemah-pengawasan-minim-2129788>
- [5] N. Zulaika, D. Lestari, and H. Istiqomah, “Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” *JPIM J. Penelit. Ilm. Multidisipliner*, vol. 1, no. 3, pp. 426–435, 2025.
- [6] A. Santoso, B. D. Melianawati, and E. A. Ayuningtyas, “Governance Analysis of The Implementation of The Free Nutritious Meal Program,” *J. Manaj. Bisnis dan Organ.*, vol. 4, no. 1, pp. 240–270, 2025, doi: 10.58290/jmbo.v4i1.423.
- [7] N. W. I. Palupi, S. R. Ummah, and P. Larasati, “Konsep dan Praktik Metode Kualitatif untuk Penelitian Sosial,” *RISOMA J. Ris. Sos. Hum. dan Pendidik.*, vol. 3, no. 4, pp. 188–198, Jun. 2025, doi: 10.62383/risoma.v3i4.855.
- [8] D. Andriani, D. B. Maritasari, I. Laela, and S. Husnadia, “PEMILIHAN TEKNIK SAMPLING YANG TEPAT DALAM PENELITIAN KUALITATIF: LITERATURE REVIEW,” *IMEIJ Indo-MathEdu Intellectuals J.*, vol. 6, no. 4, pp. 6238–6247, 2025.
- [9] I. M. Darsana *et al.*, *Manajemen Operasional*. CV. Intelektual Manifes Media, 2023.
- [10] C. F. Sari, I. M. Assajad, and M. I. Ansori, “KOMPETENSI INDIVIDU (Individual Competence),” *J. Ilm. Dan Karya Mhs.*, vol. 1, no. 4, pp. 201–214, Jul. 2023, doi: 10.54066/jikma.v1i4.490.
- [11] I. Zahara, Sumayyah, Z. Mubarrok, and M. E. Syah, “Analisis sistem pengendalian internal prosedur pengeluaran kas: COSO ICIF 2013,” *Entrep. Bisnis Manaj. Akunt.*, vol. 5, no. 1, pp. 188–200, Jun. 2024, doi: 10.37631/ebisma.v5i1.1448.
- [12] A. P. Aisyah and L. Dahlia, “Enterprise Risk Management Berdasarkan ISO 31000 Dalam Pengukuran Risiko Operasional pada Klinik Spesialis Esti,” *J. Akunt. dan Manaj.*, vol. 19, no. 2, pp. 78–90, 2022, doi: <https://doi.org/10.36406/jam.v19i01.483>.
- [13] W. M. Oktafiani, K. Yunita, H. Haryono, R. Rusliyawati, and J. Astarani, “The Government’s Internal Control System in Realizing Good Governance at the Regional Financial Agency of Pontianak City,” *Bul. Poltanesa*, vol. 26, no. 1, pp. 148–157, Jun. 2025, doi: 10.51967/tanesa.v26i1.3382.
- [14] M. R. Kaylla, H. S. Aulis, Z. Z. Salsabila, and I. A. Rohimi, “Distribusi Pasokan Bahan Pangan Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Daerah Sarijadi,” *Sinergi J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 2, no. 2, pp. 1570–1584, 2026, doi: <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi>.
- [15] A. R. Jamaludin, M. Mirza, A. Alamsyah, and A. Suseno, “Komunikasi Organisasi dalam Pengambilan Kebijakan di DPMPPTS Kota Tangerang,” *Soc. Sci. Acad.*, vol. 2, no. 1, pp. 11–22, Jan. 2024, doi: 10.37680/ssa.v2i1.4447.
- [16] H. T. T. Wahono, “Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas,” *Paradig. J. FILSAFAT, SAINS, Teknol. DAN Sos. BUDAYA*, vol. 30, no. 5, pp. 97–110, 2024, doi: <https://doi.org/10.33503/paradigma.v30i5.962>.